

EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Suripto

Peneliti Muda Pusat Litbang SIOAN - Lembaga Administrasi Negara
Jl. Veteran 10 Jakarta Pusat, Email : suripto3x@rocketmail.com / rivto76@yahoo.co.id

Abstract

West Kalimantan province to target achievement of Human Development Index (HDI) in 2009 amounted to 69.15, however the HDI value is lower than target in the Medium Term Development Plan (MTDP) Region in 2008 to 2013 which amounted to 73.9. The condition is caused either because the conditions of infrastructure which is still not good. On the other hand, the provincial government has also improved the infrastructure, facilities and infrastructure to improve HDI West Kalimantan. Study was conducted to answer the question whether the increase in infrastructure construction, infrastructure, human resource and infrastructure development has been effective in humans in the West Kalimantan? What about human development each district/city in the province of West Kalimantan? How does the level of resource efficiency in improving IPM every district/city in the province of West Kalimantan? The goal is to evaluate and give a level of effectiveness and efficiency of human development in the province of West Kalimantan. Then, the concept of IPM is used is the result of Indonesia's human development congress. Software used in the analysis of DEA with DEA-Solver models Pro5.0 / BCC (BCC-O). Results of analysis showed that the human development of West Kalimantan Province is relatively less efficient, or with a value of 0.850. Health variables have the value 0.780, education variable with a value of 0.779 and variable purchasing power by 0.990. While the views of any districts/cities, four counties/cities have a very efficient value or the value of 1000 includes the District of North Kayong, Pontianak regency, Singkawang and Pontianak. District/cities with the more efficient is Sekadau District. While the other has an average value is less efficient.

Keywords : *evaluation, efficient, West Kalimantan, Human Development Index*

A. Pendahuluan

Kalimantan Barat Bersatu Dan Maju¹ merupakan visi Provinsi Kalimantan Barat yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2008-2028. Sedangkan, visi jangka menengah "Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat Yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya dan Sejahtera."² Salah satu prioritas utama

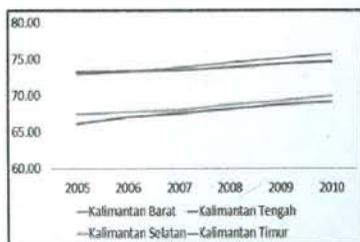
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahap Pertama (2008 s.d. 2012) adalah Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam RPJMD tersebut, Provinsi Kalbar menargetkan capaian IPM pada tahun 2013 sebesar 77.0. Namun sampai dengan tahun terakhir tahap pertama, Propinsi Kalimantan Barat berada pada urutan 28 dari 33 provinsi di Indonesia.³ Peringkat

¹ Visi RPJP Provinsi Kalimantan Barat 2008-2028

² RPJMD - BAB IV VISI, MISI, SASARAN dan STRATEGI PEMBANGUNAN

³ Beranda Depan, Daerah Perbatasan di Propinsi Kalimantan Barat,
http://buk.depkes.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=165:beranda-depan-daerah-perbatasan-di-propinsi-kalimantan-barat

tersebut hanya lebih baik dari Provinsi Maluku Utara, Irian Jaya Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua. Selanjutnya, peringkat tersebut jika dibandingkan dengan tahun 1999, maka IPM Provinsi



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1

Perkembangan IPM Regional Kalimantan Tahun 2005 - 2010

Kalimantan Barat menempati peringkat 23 atau mengalami penurunan 6 tingkat.

Perkembangan IPM provinsi tahun 2005 - 2010 di lingkungan Regional Kalimantan seperti pada Gambar 1. Data tahun 2010 menunjukkan IPM tertinggi ditempati Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai 75,56, diikuti Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai 74,64, Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai 69,92 dan terakhir Provinsi Kalimantan Barat sebesar 69,15.

Pembangunan IPM Kalbar tersebut masih jauh dari target yang diharapkan sebesar 73,9.⁴ Capaian tersebut tidak terlepas dari kondisi infrastruktur Provinsi Kalbar yang kurang baik, sebagai contoh kondisi jalan provinsi dari Nanga Pinoh ke Kecamatan Tanah Pinoh, jalan provinsi yang ada di Sintang, Sekadau, Sanggau dan Kapuas Hulu⁵ yang mengalami rusak berat. Kondisi tersebut berdampak pada pelayanan kesehatan, pendidikan dan

ekonomi. Pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi sulit diakses masyarakat. Begitu juga dalam hal ekonomi, hasil produksi seperti pertanian menjadi relatif lebih mahal yang disebabkan biaya transportasi yang juga lebih mahal. Sebagai contoh, menurut Salam,⁶ Warga Teluk Pongkal, yang harus mengeluarkan dana sekitar Rp 200 ribu untuk sampai ke ibu kota kecamatan.

Dengan capaian IPM tahun 2010 yang masih memiliki selisih 4,75, Provinsi Kalbar memerlukan kerja *extra* untuk mencapai target yang telah ditentukan tahun 2013 yakni 77,0. Hal ini tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi tetapi juga pemerintah kabupaten dan kota di lingkungan Kalimantan Barat. Dalam mewujudkan target tersebut, Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 menyediakan "Anggaran pendidikan dalam APBD Kalbar sebesar 22,7 persen."⁷ Selanjutnya, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) sebesar 3 miliar.⁸ Kementerian Pekerjaan Umum juga mengalokasikan anggaran senilai Rp 336,8 miliar untuk pengembangan infrastruktur di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dan

⁴ Kondisi yang diharapkan (diperkiraan) dalam RPJMD 2008-2012.

⁵ IPM Kalbar Terendah di Kalimantan (6): Pembangunan Tak Merata, Mayoritas Desa Sulit Diakses <http://www.kalbariana.net/ipm-kalbar-terendah-di-kalimantan-6-pembangunan-tak-merata-mayoritas-desa-sulit-diakses>

⁶ Ketua Kelompok Diskusi Ekonomi Pembangunan (Kosdep) Melawi, M Salam - IPM Kalbar Terendah di Kalimantan (6): Pembangunan Tak Merata, Mayoritas Desa Sulit Diakses <http://www.kalbariana.net/ipm-kalbar-terendah-di-kalimantan-6-pembangunan-tak-merata-mayoritas-desa-sulit-diakses>

⁷ Anggota Komisi D DPRD Provinsi Kalbar Martinus Sudarno SH - Visi Pemprov Kalbar Melenceng : Anggaran Pendidikan Melorot <http://www.equator-news.com/utama/20111216/visi-pemprov-kalbar-melenceng>

⁸ Menkes Alokasikan 3 Milyar Untuk Pelayanan Kesehatan Kalbar <http://www.kalbarprov.go.id/berita.php?id=1655>

Kalimantan Timur.⁹ Alokasi Anggaran pendidikan yang telah ditetapkan Provinsi Kalbar tahun 2012 telah sesuai dengan Strategi kebijakan fokus untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan profesionalisme sumber daya manusia dengan pengalokasian anggaran pendidikan dalam APBD sebesar 20 persen. Alokasi anggaran kesehatan digunakan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang masih rendah. Sebagai contoh : angka kematian ibu melahirkan 403 per 100.000 kelahiran hidup, angka kematian bayi 46 per 1.000 kelahiran hidup, kematian balita 59 per 1000 kelahiran hidup, prevalensi gizi buruk sebesar 2,14 persen, umur harapan hidup 66,6 tahun jika dibandingkan dengan angka nasional yaitu 69,2 tahun¹⁰.

Pembangunan Manusia Provinsi Kalbar secara kuantitas menunjukkan peningkatan dalam hal sarana, prasarana, sumber daya manusia dan infrastruktur. Hal tersebut dilihat dari meningkatnya jumlah sekolah, jumlah tenaga pendidik/guru, jumlah siswa, jumlah tenaga kesehatan dan lainnya. Sektor pendidikan jumlah sarana SD tahun 2009/2010 telah mencapai 4.046 unit, jumlah siswa meningkat 2,62 persen dibandingkan tahun 2008/2009 dan jumlah guru mencapai 37.118 orang. Tingkat pendidikan SLTP juga mengalami peningkatan meliputi jumlah sarana bertambah sebanyak 1.022 unit, jumlah siswa meningkat 3,32 persen dan

guru meningkat 15,22 persen dibandingkan tahun 2008/2009. Kemudian, tingkat pendidikan menengah umum/kejuruan sarana meningkat 338 unit, jumlah siswa meningkat 3,2 persen dan jumlah guru sekolah menengah kejuruan (SMK) meningkat 20,5 persen dibandingkan tahun 2008/2009. Sektor kesehatan, Provinsi Kalbar sampai tahun 2009 telah memiliki 230 unit puskesmas, 889 unit puskesmas pembantu, 291 unit puskesmas keliling, 34 unit rumah sakit dan 2.928 unit tempat tidur. Selanjutnya, pembangunan prasarana (jalan) sampai dengan tahun 2009 tercatat 16.618 km yang meliputi jalan negara 10,02 persen, jalan Provinsi 9,39 persen, dan jalan kabupaten/kota 80,59 persen. Pembangunan prasarana ini sangat penting untuk mempermudah mobilitas penduduk dalam kegiatan masyarakat termasuk aspek ekonomi.

IPM Provinsi Kalbar meningkat dari tahun ke tahun dengan diikuti peningkatan sarana, prasarana, sumber daya manusia. Namun demikian, peningkatan tersebut belum mengubah posisi Provinsi Kalbar dalam peringkat IPM Nasional. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan, Apakah peningkatan pembangunan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan infrastruktur telah efektif dalam pembangunan manusia di Kalbar ? Bagaimana pembangunan manusia di setiap kabupaten dan kota Provinsi Kalbar? Bagaimana tingkat efisiensi sumber daya dalam peningkatan IPM di setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalbar? Selanjutnya dengan mendasarkan pada pertanyaan tersebut,

⁹ Anggaran pembangunan infrastruktur di Kalbar dan Kaltim Rp 336,8 miliar
<http://nasional.kontan.co.id/news/anggaran-pembangunan-infrastruktur-di-kalbar-dan-kaltim-rp-3368-miliar/2011/11/09>

¹⁰ Menkes Alokasikan 3 Milyar Untuk Pelayanan Kesehatan Kalbar
<http://www.kalbarprov.go.id/berita.php?id=1655>

maka studi ini bertujuan mengevaluasi dan memberikan gambaran secara besar-besaran efektifitas dan efisiensi IPM Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalbar.

B. Tinjauan Pustaka dan Metodologi

Tinjauan pustaka merupakan tinjauan atas peraturan yang berlaku serta konsep umum dalam pembangunan manusia. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kalbar 2008 - 2013 merupakan salah satu kebijakan yang menjadi petunjuk arah dalam pembangunan Kalbar. Dengan melihat visi yang telah ditetapkan dalam RPJMD tersebut, maka orientasi utama pembangunan di Kalbar adalah pembangunan manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut, Provinsi Kalbar telah menetapkan kebijakan-kebijakan dalam pembangunan manusia. Untuk mewujudkan visi Provinsi Kalbar khususnya dalam bidang pembangunan manusia diuraikan misi-misi antara lain :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia
2. Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar

Untuk mencapai misi juga telah ditetapkan tujuh sasaran pembangunan Kalbar yang meliputi antara lain :

1. Meningkatnya sumber daya manusia yang beriman, cerdas dan berbudaya.
2. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola lapangan pekerjaan serta meningkatnya produktivitas usaha yang efisien dan efektif.
3. Meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat dengan pendapatan per

kapita di atas rata-rata kebutuhan hidup minimum.

Kemudian untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan dengan dua strategi yakni umum dan khusus. Strategi umum antara lain berfokus kepada program/kegiatan yang mempunyai daya ungkit (*leverage*) terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan strategi khususnya meliputi antara lain :

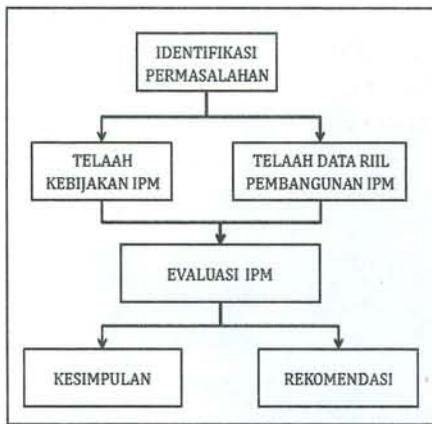
1. Strategi kebijakan pembangunan kesehatan
2. Strategi kebijakan pengembangan SDM
3. Strategi kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat
4. Strategi kebijakan pembangunan infrastruktur dasar

Tinjauan konsep umum merujuk pada hasil kongres pembangunan manusia Indonesia. Kongres tersebut menetapkan variabel dalam pembangunan manusia di Indonesia yang meliputi : harapan hidup, pendidikan, pendapatan. Variabel harapan hidup adalah nilai atau angka rata-rata harapan hidup masyarakat Provinsi Kalbar, variabel ini diukur dengan jumlah sarana dan prasarana kesehatan antara lain puskesmas, puskesmas pembantu, tenaga kesehatan, puskesmas keliling dan lain-lain. Variabel pendidikan diukur dengan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas, variabel ini diukur antara lain meliputi penyediaan sarana pendidikan seperti kelas dan sekolah, jumlah guru, jumlah siswa, angka anak tidak sekolah dan lain sebagainya. Variabel pendapatan diukur dengan pendapatan perkapita.

Studi ini menggunakan metode evaluasi kepustakaan. Analisis dan

evaluasi menggunakan referensi utama Kalimantan Barat Dalam Angka 2010, 2009 dan 2008. Kondisi sosial ekonomi dan indikator penting Kalimantan Barat, kajian ekonomi regional. Selanjutnya, referensi pendukungnya antara lain website resmi Provinsi Kalimantan Barat dan kabupaten/kota didalamnya. Website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Kalbar dan nasional, dan lain sebagainya.

Sejalan dengan tujuan studi ini, maka evaluasi pembangunan manusia



Gambar 2 : Alur Study Evaluasi IPM Provinsi Kalimantan Barat

Provinsi Kalbar dilakukan melalui tahapan seperti pada gambar 2.

Tahap awal melakukan identifikasi permasalahan dengan mengangkat kendala dalam pembangunan manusia di Kalbar. Tahap kedua melakukan telaahan kebijakan dan data riil. Tahap ketiga, melakukan evaluasi efektifitas dan efisiensi pembangunan manusia. Tahap ini melakukan evaluasi efektifitas pembangunan manusia Provinsi Kalbar. Selain itu juga melakukan evaluasi efisiensi pembangunan manusia kabupaten dan kota di Provinsi

Kalbar. Tahap keempat menyimpulkan hasil analisis dan memberikan rekomendasi.

Pada tahap analisa dan evaluasi pembangunan manusia Provinsi Kalbar menggunakan alat bantu *Data Envelopment Analysis* (DEA). DEA ini merupakan alat yang dirancang dan dibangun untuk mengukur tingkat efisiensi relatif *Decision Making Unit* (DMU) dengan membandingkan antara input dan output. DMU dalam hal ini adalah kabupaten atau kota di Provinsi Kalbar. DEA memiliki banyak keuntungan antara lain dapat mengukur banyak variabel input dan output yang memiliki satuan pengukuran berbeda¹¹. Nilai yang menunjukkan efisiensi dari suatu DMU adalah 1.00 (satu), untuk memeringkat efisiensi DMU menggunakan skala likert sebagai berikut :

- a. s.d. 0.901 = kurang efisien
- b. 0.901 - 0.925 = cukup efisien
- c. 0.926 - 0.950 = efisien
- d. 0.951 - 0.975 = lebih efisien
- e. 0.976 - 1.000 = sangat efisien

Selanjutnya, DEA yang digunakan adalah model DEA-Solver Pro5.0/BCC (BCC-O). Pemilihan model ini didasarkan atas alasan penekanan peningkatan output (variabel) pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

C. Gambaran Umum Pembangunan Manusia

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan posisi strategis dan istimewa. Strategis karena

¹¹ Proceeding : 2011, Suripto, Best practice efisiensi pembangunan bidang kesehatan provinsi kalimantan timur

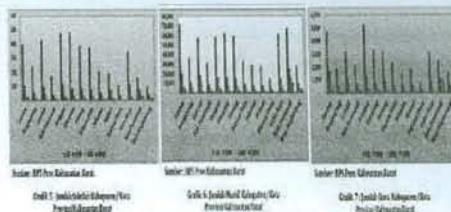
bagian utara terdapat lima kabupaten yang berbatasan langsung dengan Serawak (Malaysia) meliputi: Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kalimantan Barat sebagai beranda Indonesia. Sedangkan, keistimewaannya ditunjukkan dengan garis Khatulistiwa (garis lintang 0o) tepatnya di atas Kota Pontianak atau di antara garis 2o08' LU serta 3002' LS serta di antara 108o30' BT dan 114o10' BT. Luas wilayah Kalimantan Barat sekitar 146.807 km² atau 1,13 kali luas Pulau Jawa yang membentang lurus dari utara ke selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari barat ke timur.

Kepadatan penduduk Kalbar rata-rata 29 jiwa per kilometer persegi dengan penyebaran yang tidak merata. Hal ini dilihat dengan Kota Pontianak yang luasnya kurang dari satu persen dipadati dengan 1.648 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kabupaten Kapuas Hulu dengan luas sekitar 20,33 persen hanya dihuni rata-rata 6 (enam) jiwa per kilometer persegi. Kepadatan dan penyebaran penduduk tentunya mempengaruhi pembangunan di wilayah tersebut. Perkembangan pembangunan manusia tahun 2008 dan 2009 Kabupaten/Kota seperti pada Grafik 3, selanjutnya peringkat kabupaten/kota secara nasional seperti pada Grafik 4.

Grafik 3 menunjukkan bahwa secara nilai (angka) IPM tahun 2009 kabupaten / kota mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun demikian, capaian tersebut berbanding terbalik bila diukur dengan capaian peringkat nasional yang mengalami penurunan

seperti pada Grafik 4. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pembangunan manusia di lingkungan Provinsi Kalbar lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan di provinsi lainnya. Peningkatan pembangunan pendidikan di Provinsi Kalbar dapat dilihat indikator antara lain jumlah prasarana, murid dan guru. Jumlah prasarana pendidikan secara umum mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2008. Prasarana SLTP meningkat 12,56 persen, SMU bertambah 338 unit dan SMK sebanyak 3,45 persen. Data pembangunan prasarana pendidikan secara lebih rinci seperti pada Grafik 5.

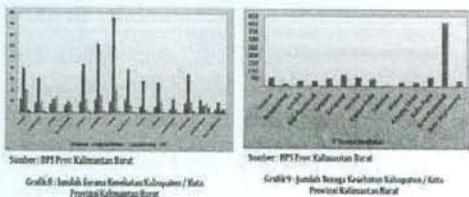
Selisih jumlah prasarana jenjang SD



dan SLTP antara 54,43 persen (Kota Pontianak) sampai 82,74 persen (Kabupaten Ketapang), sedangkan SLTP dan SLTA antara 2,78 persen (Kota Pontianak) sampai 74,19 persen (Kayong Utara). Jumlah murid SD meningkat 2,62 persen, SMP meningkat 3,32 persen dan SMU meningkat 5,43 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data jumlah murid setiap jenjang pendidikan selengkapnya pada Grafik 6. Kemudian, data guru SD mengalami peningkatan sebesar 13,61 persen, SMP 15,22 persen dan SMU 20,50 persen dibandingkan tahun 2008. Data jumlah guru setiap jenjang pendidikan selengkapnya pada Grafik 7.

Sebagaimana selisih jumlah prasarana pada setiap jenjang pendidikan, jumlah guru dan jumlah murid juga memiliki selisih yang relatif sama. Pada sektor kesehatan, Kalimantan Barat pada 2009 telah memiliki 230 puskesmas, 889 puskesmas pembantu dan 291 puskesmas keliling serta 34 rumah sakit dengan 2.928 tempat tidur. Kabupaten Sintang merupakan kabupaten yang paling banyak memiliki prasarana kesehatan yang meliputi 20 puskesmas, 171 puskesmas pembantu, 41 puskesmas keliling dan 2 rumah sakit. Data lebih rinci penyebaran prasarana kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat seperti pada Grafik 8.

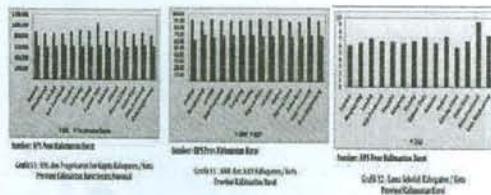
Sedangkan untuk tenaga kesehatan, Kota Pontianak memiliki tenaga kesehatan paling banyak yang meliputi



71 dokter spesialis, 229 dokter umum, 109 dokter gigi. Data penyebaran tenaga kesehatan seperti pada Grafik 9.

Selanjutnya dalam sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 paling tinggi berada di Kabupaten Kubu Raya dengan nilai 5,87 persen dan Kabupaten Ketapang memiliki pertumbuhan paling rendah yakni -1,22 persen. Kebutuhan hidup layak (KHL) yang paling tinggi berada di Kapuas Hulu dengan Nilai Rp. 1.036,092,- dan Pengeluaran per kapita paling banyak Kota Pontianak dengan nilai Rp. 638,640,-. Data rinci KHL dan

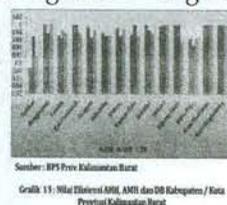
Pengeluaran per kapita seperti pada Grafik 10.



Hasil pembangunan pendidikan ditunjukkan dengan angka melek huruf (AMH), angka harapan hidup (AHH) dan rata-rata lama sekolah (LS). AMH paling tinggi berada di Kota Pontianak dengan 94,97 persen dan paling rendah 88,28 persen di Kabupaten Kayong Utara. AHH paling tinggi berada di Kabupaten Bengkayang sebanyak 68,84 tahun dan paling rendah 65,46 tahun berada di Kabupaten Landak. Data lebih detail seperti pada Grafik 11. Rata-rata lama sekolah paling baik berada di Kota Pontianak yakni 9,36 tahun dan paling rendah 5,7 tahun berada di Kabupaten Kayong Utara, selengkapnya seperti pada Grafik 12.

D. Pembahasan

Analisa Pembangunan manusia Provinsi Kalbar dilakukan dengan dua bagian yakni analisa komprehensif dan analisa parsial. Analisa komprehensif dilakukan dengan menggunakan variabel utama yang meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. Analisa parsial dilakukan dengan mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi dari masing-masing variabel. Secara rata-rata, Provinsi Kalbar relatif



kurang efisien yakni dengan nilai sebesar 0.850 dengan rincian variabel kesehatan sebesar 0.780, variabel pendidikan sebesar 0.779 dan variabel kemampuan daya beli sebesar 0.990. Kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Kalbar memiliki empat kabupaten/kota dengan nilai sangat efisien atau nilai 1.000 yakni meliputi Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Pontianak, Kota Singkawang dan Kota Pontianak. Kabupaten/kota dengan nilai lebih efisien adalah Kabupaten Sekadau. Sedangkan lainnya memiliki nilai dengan rata-rata kurang efisien. Selanjutnya hasil analisa parsial seperti pada Grafik 13¹².

1. Kabupaten Sambas

Pembangunan Manusia Kabupaten Sambas secara nasional menempati peringkat 459 atau turun 9 peringkat dari tahun 2008. Hal ini tidak jauh berbeda di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat yang menempati peringkat terakhir. Namun demikian, dengan menggunakan sumber daya tersebut, Kabupaten Sambas telah relatif cukup efektif dan efisien (nilai rata-rata 0.925) dalam pembangunan manusia. Pencapaian nilai tersebut dengan nilai rata-rata lama sekolah dengan nilai yang relatif lebih efisien yakni 0.969 dan nilai kemampuan daya beli sebesar 0.917. Sedangkan, nilai angka harapan hidup relatif kurang efisien yaitu sebesar 0.888. Dengan kondisi tersebut, Kabupaten Sambas masih dapat meningkatkan tingkat efektifitas dan efisiensi

pembangunan manusia melalui variabel pendidikan dan kesehatan. Variabel pendidikan dilaksanakan dengan meningkatkan rata-rata lama sekolah sebesar 32,45 persen dan angka melek huruf sebesar 3,11 persen. Kemudian, variabel kesehatan dapat ditingkatkan angka harapan hidup sebesar 12.65 persen.

Indikator dalam meningkatkan kinerja pendidikan yang perlu diperhatikan antara lain optimalisasi penggunaan prasarana sekolah sampai 27,53 persen dan kinerja tenaga pendidik sampai 54,86 persen. Beberapa hal penyebab kurang optimalnya prasarana dan tenaga pendidik adalah akses prasarana sekolah atau letak geografis yang menyebabkan masyarakat sulit mengakses sekolah¹³. Kesulitan akses sekolah menjadi salah satu penyebab putus sekolah tingkat pendidikan SD dan SMP, meskipun ada juga yang disebabkan faktor lain seperti ekonomi. Angka putus sekolah jenjang pendidikan SD pada 2009 sebanyak 349 siswa jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 581 siswa, jenjang pendidikan SMA/ MA/ SMK sebesar 92 siswa. Selain itu, kinerja pendidikan juga dipengaruhi oleh akses pendidikan dari jenjang SD ke SMP berkurang 73,55 persen, begitu juga untuk jenjang SMP ke SMU berkurang sebesar 55,24 persen. Seiring dengan berkurangnya akses prasarana sekolah, jumlah murid juga mengalami penurunan yang relatif sama

¹² Data IPM Prov Kalbar Tahun 2010 tanggal 2011, Angka Sementara Dalam BAB III Kinerja Pembangunan : Profil Kabupaten Sambas 2011 Hal 156

¹³ Kepala Dinas Pendidikan Sambas, Kalimantan Barat (Nurpinarto) Kawin Muda Penyebab Peningkatan Angka Putus Sekolah sumber <http://www.tribunnews.com/2011/05/02/kawin-muda-penyebab-peningkatan-angka-putus-sekolah> diakses tanggal 6 Maret 2012

yakni 71,19 untuk tingkat SMP dan 48,43 untuk tingkat SMU. Sehingga untuk meningkatkan pembangunan manusia Kabupaten Sambas yang lebih optimal perlu ditingkatkan akses pendidikan dan peningkatan kesadaran pentingnya pendidikan kepada masyarakat.

Salah satu program bidang kesehatan Kabupaten Sambas adalah meningkatkan umur harapan hidup dari 66,2 tahun menjadi 70,6 tahun¹⁴. Untuk mencapainya, kebijakan pembangunan kesehatan telah dilakukan antara lain dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas puskesmas dan tenaga kesehatan. Walaupun, pelayanan kesehatan meningkat antara lain dengan program pelayanan asuransi kesehatan miskin (Askeskin) yang meningkat 9,13 persen¹⁵, tetapi tingkat efektifitas dan efisiensinya belum optimal. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisa kinerja puskesmas dapat dioptimalkan sebesar 32 persen, puskesmas pembantu sebesar 22,5 persen dan puskesmas keliling sebesar 74 persen.

Penduduk miskin Kabupaten Sambas tahun 2009 menurun sebesar 12,52 persen dibandingkan dengan tahun 2008. Prestasi tersebut ditunjukkan dengan berkurangnya pemegang surat miskin sebesar 8,47 persen dan berkurangnya rumah tangga penerima raskin sebesar 15,41 persen. Namun

demikian, ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan daya beli dapat dioptimalkan lagi sebesar 9,04 persen. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan aktifitas ekonomi. Dimana, Kabupaten Sambas memiliki peluang potensi ekonomi yang sangat luar biasa diantaranya luas areal pertanian padi yang mencapai 87.775 ha, kawasan hutan sekitar 2,20 persen dari luas kawasan hutan Provinsi Kalimantan Barat, potensi perikanan sungai dan laut serta perusahaan industri kecil dan rumah tangga yang mencapai 1.467 unit.

2. Kabupaten Bengkayang

Kabupaten Bengkayang memiliki nilai pembangunan IPM yang relatif sangat efisien yakni dengan rata-rata sebesar 0,992. Pembangunan kesehatan dan ekonomi memiliki nilai yang relatif sangat baik dengan capaian 1.000. Sedangkan dari sisi pendidikan, Kabupaten Bengkayang masih memiliki potensi untuk mengoptimalkan kinerjanya. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan rata-rata lama sekolah sebesar 7,86 persen dan angka melek huruf sebesar 2,44 persen. Indikator yang perlu menjadi perhatian utama adalah efektifitas kinerja pendidikan dasar (SD) dengan peningkatan antara 15,17 – 36,40 persen. Kemungkinan adanya peningkatan ini tentunya masih sangat besar mengingat data tahun 2009 menunjukkan bahwa jumlah sekolah SD dibandingkan dengan jumlah sekolah SMP memiliki selisih 78,19 persen dan jumlah sekolah SMP dengan SMU memiliki selisih 54,72 persen. Selaras dengan hal tersebut, jumlah murid juga mengalami penurunan yang sama yakni 72,82

¹⁴ Plt Kadis Kesehatan, Sjachrin Harahap SH : 4 Sasaran Pembangunan Kesehatan Sambas sumber <http://humassambas.com/info-humas/4-sasaran-pembangunan-kesehatan-sambas/> diakses tanggal 6 Maret 2012

¹⁵ BAB IV Karakteristik Sosio-Demografis : Profil Kabupaten Sambas 2011 Hal 62 sumber <http://humassambas.com/download/8persen20BABpersen204persen20Karakteristikpersen20Sosi-o-Demografis.pdf> diakses 6 maret 2012

persen untuk ke SMP dan 42,65 persen untuk ke SMU. Sehingga, Pemerintah Kabupaten Bengkayang masih memiliki potensi dalam meningkatkan kinerja pendidikan dengan mempermudah fasilitas dan pelayanan pendidikan.

3. Kabupaten Landak

Pembangunan manusia Kabupaten Landak memiliki nilai relatif sangat efisien. Hasil ini ditunjukkan dengan capaian nilai rata-rata sebesar 0.977. Meskipun demikian, variabel pembangunan manusia masih memiliki potensi untuk dioptimalkan kinerjanya. Kinerja dalam bidang kesehatan antara lain ditunjukkan dengan pelayanan kesehatan kepada sebanyak 269 ribu jiwa masyarakat yang dibiayai oleh pemerintah melalui pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dari pemerintah pusat dan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Landak.¹⁶ Akan tetapi, analisa menunjukkan bahwa variabel kesehatan masih dapat dilakukan dengan meningkatkan angka harapan hidup sebesar 2,91 persen. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama untuk kinerja puskesmas yang dapat ditingkatkan sampai dengan 43,6 persen. Optimalisasi kinerja tentunya sangat bisa ditingkatkan karena masih banyak masyarakat miskin terutama di pedalaman yang belum mendapat

kesehatan dengan maksimal.¹⁷ Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah rumah sakit dan tenaga medis serta kondisi geografis yang luas sehingga sulit menjangkau layanan kesehatan. Selain itu, pemerintah pusat telah menyediakan anggaran mencapai Rp. 27 miliar untuk pelayanan kesehatan di Kalbar.

4. Kabupaten Pontianak

Kabupaten Pontianak memiliki nilai yang relatif sangat efisien dalam pembangunan manusia yakni sebesar 0.993. Capaian tersebut menunjukkan bahwa variabel kesehatan (angka harapan hidup) dan variabel pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah) serta variabel kemampuan daya beli juga telah sangat baik.

5. Kabupaten Sanggau

Hasil analisa pembangunan manusia menunjukkan bahwa Kabupaten Sanggau memiliki capaian yang sangat baik, dimana nilai rata-rata efisiensinya sebesar 0.983. Akan tetapi, Kabupaten Sanggau juga masih memiliki kesempatan untuk meningkatkan kinerjanya. Ditinjau dari variabel pendidikan, Kabupaten Sanggau dapat meningkatkan indikator rata-rata lama sekolah sebesar 16,84 persen dan indikator angka melek huruf sebesar 3,44 persen. Beberapa hal yang dilakukan yakni peningkatan kinerja pendidikan terutama pada program pendidikan dasar sembilan tahun yang dilakukan dengan meningkatkan jumlah prasarana dan murid tingkat lanjutannya. Hal ini

¹⁶ Pembangunan Kabupaten Landak Baru Mencapai Sasaran Dan Belum ke Tujuan sumber <http://cakrawalainterprize.com/2011/06/03/pembangunan-kabupaten-landak-baru-mencapai-sasaran-dan-belum-ke-tujuan/> diakses tanggal 13 Maret 2012

¹⁷ Ketua Komisi IX, dr. Ribka Tjiptaning : Komisi IX prihatin pelayanan kesehatan di Kalbar sumber <http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi9/2011/des/23/3493/Komisi-IX-prihatin-pelayanan-kesehatan-di-Kalbar> diakses tanggal 13 Maret 2012

penting dilakukan karena jumlah sekolah SD ke SMP memiliki selisih sebesar 77,15 persen dan jumlah sekolah SMP ke SMU memiliki selisih sebesar 57,80 persen. Kondisi tersebut juga menurunkan jumlah murid, selisih SD ke SMP sebesar 72,64 persen dan selisih SMP ke SMU sebesar 46,75 persen. Peluang untuk meningkatkan pelayanan pendidikan semakin baik dengan masuknya "Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, merupakan salah satu dari 10 provinsi yang mendapat bantuan dan pelayanan dari World Vision Indonesia,"¹⁸ Sedangkan, variabel kesehatan dapat dioptimalkan dengan angka harapan hidup sebesar 0.51 persen. Peningkatan dalam bidang kesehatan terutama dalam tenaga kesehatan dan puskesmas pembantu. Optimalisasi kinerja tentunya sangat bisa ditingkatkan karena masih banyak masyarakat miskin terutama di pedalaman yang belum mendapat kesehatan dengan maksimal.¹⁹ Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah rumah sakit dan tenaga medis serta kondisi geografis yang luas sehingga sulit menjangkau layanan kesehatan. Selain itu, pemerintah pusat telah menyediakan anggaran mencapai Rp 27 miliar untuk pelayanan kesehatan di Kalbar.

¹⁸ John Nelwan, Marketing Public Relation Manager World Vision Indonesia : Pendidikan Unik-Kreatif dari Daerah Pedalaman sumber <http://nasional.kompas.com/read/2008/12/23/00424289/> diakses tanggal 13 Maret 2012

¹⁹ Ketua Komisi IX, dr. Ribka Tjiptaning : Komisi IX prihatin pelayanan kesehatan di Kalbar sumber <http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi9/2011/des/23/3493/Komisi-IX-prihatin-pelayanan-kesehatan-di-Kalbar> diakses tanggal 13 Maret 2012

6. Kabupaten Ketapang

Pembangunan manusia Kabupaten Ketapang telah mencapai nilai lebih efisien dan efektif. Capaian ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata variabel sebesar 0.974. Namun demikian, berdasarkan hasil analisa menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut masih dapat dioptimalkan. Variabel kesehatan dengan angka harapan hidup memiliki nilai 0.979. Berdasarkan hasil itu, angka harapan hidup dapat ditingkatkan sebesar 2,06 persen. Indikator yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan angka harapan hidup adalah peningkatan kinerja puskesmas sebesar 29,17 persen, puskesmas pembantu 50 persen dan puskesmas keliling 37,50 persen. Data prasarana kesehatan tahun 2009 meliputi 24 unit puskesmas, 124 puskesmas pembantu, 32 unit puskesmas keliling dan 2 unit rumah sakit. Namun demikian, untuk meningkatkan pelayanan, masih terdapat sekitar 15-20 persen desa yang belum memiliki puskesmas beserta tenaga dan peralatan medis, dengan alasan desa tersebut masuk dalam wilayah pemekaran.²⁰ Selanjutnya, variabel pendidikan memiliki nilai lebih efisien dengan capaian sebesar 0.971. Sedangkan rekomendasi peningkatan indikator yang dibutuhkan yakni rata-rata lama sekolah sebesar 18,59 persen dan angka melek huruf sebesar 3,03 persen. Peningkatan variabel pendidikan terutama fokus pada pendidikan

²⁰ Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Hery Sulistyio : Tingkatkan Sarana Kesehatan di Kecamatan sumber <http://www.ketapangkab.go.id/> diakses tanggal 13 Maret 2012

sekolah dasar 29,38 persen. Hal ini tentunya sangat terbuka dan memungkinkan karena selisih sekolah antara sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sebesar 82,74 persen dan 50,60 persen dari sekolah menengah pertama ke menengah atas. Begitu juga selisih jumlah siswa yang menikmati pendidikan lanjutannya, sebanyak 74,37 persen tidak dapat menikmati pendidikan sekolah menengah pertama, dan sebanyak 37 persen murid belum menikmati pendidikan menengah atas. Selain itu, kondisi penyebaran guru tingkat TK, SD, SMU, dan SMK yang tidak merata. Di satu sisi, ada sekolah yang kekurangan guru di tengah sekolah lain yang kelebihan tenaga peendidik. Sehingga, menurut Hendrikus Jahilin, hal itu menyebabkan mutu pendidikan di daerah itu masih sangat rendah dan perlu keseriusan yang lebih untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain.²¹

7. Kabupaten Sintang

Kabupaten Sintang memiliki capaian pembangunan manusia sangat efisien dan efektif dengan nilai sebesar 0.985. Prestasi ini ditunjukkan dengan nilai variabel daya beli dan angka harapan hidup sangat baik sedangkan variabel pendidikan lebih baik. Meskipun demikian, Kabupaten Sintang masih dapat mengoptimalkan kinerja variabel pendidikan dengan meningkatkan rata-rata lama sekolah 15,9 persen dan angka

²¹ Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang Mutu Pendidikan Ketapang Rendah sumber http://www.ketapangkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=71:mutu-pendidikan-ketapang-rendah&catid=1:latest-news&Itemid=50 diakses tanggal 13 Maret 2012

melek huruf 2,93 persen. Optimalisasi kinerja variabel pendidikan memiliki peluang yang sangat baik. Hal ini disebabkan kondisi prasarana sekolah antar tingkat yang memiliki selisih sangat banyak. Selisih jumlah sekolah menengah dari sekolah dasar sebesar 78,55 persen dan sekolah menengah atas dari menengah pertama sebesar 53,01 persen. Ini menunjukkan bahwa selama sarana dan prasarana pendidikan kita masih belum maksimal.²² Seiring dengan hal tersebut, jumlah siswa juga memiliki selisih yang cukup besar yakni 74,96 persen di pendidikan menengah pertama dan 38,89 persen untuk menengah atas. Kondisi tersebut diperburuk dengan dengan persentase putus sekolah tertinggi terjadi pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 1,03 persen, terendah pada jenjang SMP/MTS 0,76 persen dan pada jenjang SMA/SMK/MA sebesar 0,81 persen²³. Selanjutnya, variabel kesehatan dapat diotimalkan sebesar 2.06 persen, terutama pada kinerja tenaga kesehatan sebesar 76,79 persen, puskesmas pembantu sebesar 63,74 persen dan puskesmas keliling sebesar 51,22 persen. Kondisi sarana dan prasarana kesehatan tahun 2009 memiliki 20 unit puskesmas, 171 unit puskesmas pembantu, 41 unit

²² bupati Milton Crosby. Prioritaskan Dunia Pendidikan sumber http://www.sintang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=225:prioritaskan-dunia-pendidikan&catid=1:terkini&Itemid=140 diakses tanggal 13 Maret 2012

²³ bupati Milton Crosby. Prioritaskan Dunia Pendidikan sumber http://www.sintang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=225:prioritaskan-dunia-pendidikan&catid=1:terkini&Itemid=140 diakses tanggal 13 Maret 2012

puskesmas keliling, 2 unit rumah sakit dan 56 tenaga kesehatan. Optimalisasi kinerja variabel kesehatan juga memiliki peluang yang cukup besar dengan adanya komitmen pimpinan (wakil bupati) untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien serta tekad untuk mewujudkan *Millenium Development Goals* (MDGs).

8. Kabupaten Kapuas Hulu

Prestasi pembangunan manusia Kabupaten Kapuas Hulu relatif sangat efisien dengan capaian nilai 0.983. Nilai pada variabel pendidikan dengan indikator rata-rata lama sekolah dan melek huruf relatif sangat efisien. Sedangkan untuk variabel kesehatan masih memiliki peluang untuk dioptimalkan sebesar 2,55 persen, terutama untuk indikator tenaga kesehatan dapat ditingkatkan sebesar 78,61 persen. Beberapa penyebab kurang optimalnya kinerja karena kondisi geografis yang sangat sulit akses pelayanan kesehatan, terbatasnya jumlah tenaga kesehatan terutama, bidan dan perawat untuk Poskesdes dan puskesmas pembantu, terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di desa-desa serta masih kurang disiplinnya pegawai. Sehingga permasalahan kesehatan masih sering dihadapi seperti masih tingginya AKB dan AKB, angka kesakitan karena penyakit menular seperti malaria, TBC, diare dan angka kesakitan penyakit tidak menular seperti jantung dan stroke. Untuk mengoptimalkan hal tersebut, Pemda sudah mengambil langkah-langkah guna mengurangi permasalahan itu, antara lain dengan menambah sarana pelayanan kesehatan, rekrutmen

tenaga horor paramedis untuk mengisi kekosongan di sarana pelayanan kesehatan.

9. Kabupaten Sekadau

Pembangunan manusia Kabupaten Sekadau memiliki nilai yang relatif sangat efisien yakni sebesar 0.988. Variabel angka harapan hidup dan angka melek huruf sangat baik dan daya beli lebih baik. Namun demikian, optimalisasi kinerja dapat dilakukan dengan meningkatkan variabel pendidikan, indikator melek huruf 1,45 persen dan lama sekolah 3,02 persen. Terutama berfokus pada pendidikan sembilan tahun dimana data tahun 2009 menunjukkan bahwa 73,08 persen sekolah menengah pertama lebih sedikit dibandingkan sekolah dasar. Begitu juga, jumlah murid menengah pertama lebih sedikit 74,76 persen dibandingkan murid sekolah dasar. Potensi peningkatan kinerja pendidikan dasar tentunya dapat dilaksanakan dengan Program *Kinerja-United States Agency for International Development* (USAID) dengan prioritas peningkatan pelayanan publik sektor pendidikan dasar yang salah satunya diselenggarakan di Kabupaten Sekadau.

10. Kabupaten Melawi

Kabupaten Melawi memiliki nilai pembangunan manusia yang relatif sangat efisien yakni dengan capaian sebesar 0.998. Variabel pendidikan, kesehatan dan kemampuan daya beli juga memiliki nilai yang relatif sangat efektif dan efisien. Akan tetapi untuk mencapai nilai 1.000, Kabupaten Melawi perlu meningkatkan angka harapan hidup sebesar 0,39 persen dengan fokus optimalisasi pada puskesmas pembantu dan puskesmas keliling.

11. Kabupaten Kubu Raya

Kabupaten Kubu Raya memiliki nilai pembangunan manusia yang lebih baik yakni sebesar 0.957. Ketiga variabel IPM masih memiliki potensi untuk ditingkatkan kinerjanya. Variabel angka harapan hidup memiliki nilai sebesar 0.963 dan dapat dioptimalkan sebesar 3,83 persen dengan fokus peningkatan kinerja 77,59 persen. Selanjutnya, variabel angka melek huruf telah efisien dengan nilai 0.947 dan variabel daya beli juga lebih efisien dengan nilai 0.963. Peningkatan kinerja pembangunan manusia tentunya memiliki peluang besar dengan kebijakan pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan proporsi 47 persen yang dialokasikan untuk belanja rutin pemerintah dan sebanyak 53 persen lainnya dialokasikan untuk belanja publik²⁴. Belanja publik terutama meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam bidang pendidikan antara lain pembangunan dan renovasi sekolah, biaya operasional sekolah dan seragam untuk siswa kurang mampu. Bidang kesehatan antara lain menambah kuota jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dari 6.900 jiwa dan meningkatkan fasilitas kesehatan. Sedangkan bidang infrastruktur dengan mengurangi proyek-proyek berskala besar dan mengalihkannya pada pengelolaan swakelola atau imbal swadaya, contoh pembangunan jumlah ruas pembangunan jalan 187 ruas.

²⁴ Kubu Raya Pun Memotong Belanja Rutin sumber <http://nasional.kompas.com/read/2011/02/07/03091695/> diakses tanggal 14 Maret 2012

12. Kabupaten Kayong Utara

Kabupaten Kayong Utara juga memiliki nilai yang sangat efisien dengan memiliki nilai pembangunan manusia sebesar 0.985. Variabel pembangunan manusia di ketiga kabupaten dan kota tersebut juga sangat efisien.

13. Kota Pontianak dan Singkawang

Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kayong Utara, Kota Pontianak dan Kota Singkawang memiliki nilai pembangunan manusia sempurna yakni sebesar 1.000. Capaian yang telah dicapai kota ini menjadikan kabupaten di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat dapat mereferensi perbaikan ke kota tersebut.

E. Penutup

Berdasarkan uraian diatas, peningkatan pembangunan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan infrastruktur di Kalimantan Barat telah meningkatkan IPM secara nilai kuantitas. Namun secara nilai kualitas atau peringkat nasional, pembangunan IPM Kalimantan Barat belum mengalami perubahan. Selanjutnya, hasil analisa DEA dengan model DEA-Solver Pro5.0/BCC-O menunjukkan bahwa pembangunan manusia Provinsi Kalbar relatif kurang efisien yakni dengan nilai sebesar 0.850 dengan rincian variabel kesehatan sebesar 0.780, variabel pendidikan sebesar 0.779 dan variabel kemampuan daya beli sebesar 0.990. Selanjutnya, kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Kalbar memiliki empat kabupaten/kota dengan nilai sangat efisien atau nilai 1.000 yakni meliputi Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Pontianak, Kota Singkawang dan Kota Pontianak. Kabupaten/kota

dengan nilai lebih efisien adalah Kabupaten Sekadau. Sedangkan lainnya memiliki nilai dengan rata-rata kurang efisien.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan manusia kabupaten dapat merujuk pada Kabupaten Kayong Utara, Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Namun demikian rujukan secara rinci untuk setiap variabel sebagai berikut :

- Variabel kesehatan meliputi Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kayong Utara, Kota Pontianak dan Kota Singkawang.
- Variabel Pendidikan meliputi Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Melawi Kota Pontianak dan Kota Singkawang.
- Variabel Kemampuan Daya Beli meliputi Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Melawi Kota Pontianak dan Kota Singkawang.

Daftar Pustaka :

- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007 - 2027
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008 - 2013
- BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2010. Kalimantan Barat Dalam Angka 2010, Pontianak, BPS Provinsi Kalimantan Barat
- BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2009. Kalimantan Barat Dalam Angka 2009, Pontianak, BPS Provinsi Kalimantan Barat
- BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2008. Kalimantan Barat Dalam Angka 2008, Pontianak, BPS Provinsi Kalimantan Barat
- BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2007. Kalimantan Barat Dalam Angka 2007, Pontianak, BPS Provinsi Kalimantan Barat
- BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2007. Kalimantan Barat Dalam Angka 2007, Pontianak, BPS Provinsi Kalimantan Barat
- Harian Equator, 2011. IPM Kalbar Terendah di Kalimantan (7): KKKU Perlahan Keluar dari Jerat Masalah Pendidikan (Online). <http://www.equator-news.com/utama/box/ipm-kalbar-terendah-di-kalimantan/7-kku-perlahan-keluar-dari-jerat-masalah-pendidikan> (Diakses : 15 November 2011)
- Harian Equator, 2011. IPM Kalbar Terendah di Kalimantan (6): Pembangunan Tak Merata, Mayoritas Desa Sulit (Online). <http://www.kalbariana.net/ipm-kalbar-terendah-di-kalimantan-6-pembangunan-tak-merata-mayoritas-desa-sulit-diakses> (Diakses : 15 November 2011)
- Humas Sambas, 2012. Profil Kabupaten Sambas 2011 : Bab V Potensi Perekonomian (Online) <http://humassambas.com/download/9persen20BABpersen205persen20Po>

- [tensipersen20Perekonomian.pdf](#) (Diakses : 6 Maret 2012)
- Suhendra, 2011. Kawin Muda Penyebab Peningkatan Angka Putus Sekolah, *Tribun News* (Online) <http://www.tribunnews.com/2011/05/02/kawin-muda-penyebab-peningkatan-angka-putus-sekolah> (Diakses : 6 Maret 2012)
- Humas Sambas, 2009. 4 Sasaran Pembangunan Kesehatan Sambas (Online) <http://humassambas.com/info-humas/4-sasaran-pembangunan-kesehatan-sambas/> (Diakses : 6 Maret 2012)
- Humas Sambas, 2012. Profil Kabupaten Sambas 2011 Bab IV Karakteristik Sosio-Demografis (Online) <http://humassambas.com/download/8persen20BABpersen204persen20Karakteristikpersen20Socio-Demografis.pdf> (Diakses : 6 Maret 2012)
- Humas Sambas, 2012. Profil Kabupaten Sambas 2011 : BAB III Kinerja Pembangunan (Online) (Diakses : 6 Maret 2012)
- Suripto, 2011. Best practice efisiensi pembangunan bidang kesehatan provinsi kalimantan timur : Proceeding: Simposium Nasional Otoda, Serang, 228 - 234, Mei 2011.
- Harian Equator, 2011. Visi Pemprov Kalbar Melenceng : Anggaran Pendidikan Melorot (Online) <http://www.equator-news.com/utama/20111216/visi-pemprov-kalbar-melenceng> (Diakses : 6 Maret 2012)
- Humas Pemrov Kalbar, 2012. Menkes Alokasikan 3 Milyar Untuk Pelayanan Kesehatan Kalbar (Online) <http://www.kalbarprov.go.id/berita.php?id=1655> (Diakses : 6 Maret 2012)
- Muhammad Yazid, 2011. Anggaran pembangunan infrastruktur di Kalbar dan Kaltim Rp 336,8 miliar. *Kontan* (Online) <http://nasional.kontan.co.id/news/anggaran-pembangunan-infrastruktur-di-kalbar-dan-kaltim-rp-3368-miliar/2011/11/09> (Diakses : 6 maret 2012)
- Humas Kabupaten Kayong Utara, _____. Beranda Depan, Daerah Perbatasan di Propinsi Kalimantan Barat, (Online) http://buk.depkes.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=165:beranda-depan-daerah-perbatasan-di-propinsi-kalimantan-barat (Diakses : 6 Maret 2012)
- Y Humkol Bky, 2011. Musrenbang RKPD Kab. Bengkayang tahun 2012 (Online) <http://www.bengkayangka>

- b.go.id/news/view/108
(Diakses : 6 Maret 2012)
- Syafarudi, 2011. Pembangunan Kabupaten Landak Baru Mencapai Sasaran Dan Belum ke Tujuan, Cakrawala (Online)
<http://cakrawalainterprize.com/2011/06/03/pembangunan-kabupaten-landak-baru-mencapai-sasaran-dan-belum-ke-tujuan/> (Diakses : 13 Maret 2012)
- Yurnaldi, 2008. Marketing Public Relation Manager World Vision Indonesia : Pendidikan Unik-Kreatif dari Daerah Pedalaman (Online)
<http://nasional.kompas.com/read/2008/12/23/00424289/> (Diakses : 13 Maret 2012)
- _____, 2011. Komisi IX prihatin pelayanan kesehatan di Kalbar (Online)
<http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi9/2011/des/23/3493/Komisi-IX-prihatin-pelayanan-kesehatan-di-Kalbar> (Diakses : 13 Maret 2012)
- Harian Equator, 2011. Tingkatkan Sarana Kesehatan di Kecamatan (Online)
<http://www.ketapangkab.go.id/> (Diakses : 13 Maret 2012)
- Kalimantan-News, 2011. Wabup: Tingkatkan Kesehatan Masyarakat Untuk Wujudkan MDG's (Online)
<http://www.kalimantan-news.com/berita.php?idb=3575> (Diakses : 14 Maret 2012)
- Dinas Kesehatan Kapus Hulu, 2011. Dinkes Sosialisasikan Penggunaan Dana BOK dan Jempersal (Online)
<http://dinkes.kapuashuluka.b.go.id/konten/109> (Diakses : 14 Maret 2012)
- Antara, 2011. 12 Kabupaten/Kota Berkomitmen Tingkatkan Pelayanan Publik (Online)
<http://id.berita.yahoo.com/12-kabupaten-kota-berkomitmen-tingkatkan-pelayanan-publik-094219916.html> (Diakses : 14 Maret 2012)
- A Handoko, 2011. Kubu Raya Pun Memotong Belanja Rutin (Online)
<http://nasional.kompas.com/read/2011/02/07/03091695/> (Diakses : 14 Maret 2012)